

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN LOKAL MELALUI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LORONG DI KOTA MAKASSAR

REALIZING LOCAL INDEPENDENCE THROUGH LORONG COMMUNITY EMPOWERMENT EFFORTS IN MAKASSAR CITY

Mohammad Mulyadi

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270, Indonesia
e-mail: mohammadmulyadi@yahoo.co.id
Diserahkan: 3/07/2017, Diperbaiki: 03/08/2017, Disetujui: 20/09/2017

Abstrak

Salah satu wujud kemandirian lokal yang tercipta dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah pemberdayaan masyarakat lorong. Beranjak dari pemikiran tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana wujud kemandirian lokal melalui karakteristik: memiliki kapasitas diri; memiliki tanggung jawab kolektif; dan memiliki kemampuan berpikir. Desain penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas diri dari masyarakat lorong di Kota Makassar adalah: motivasi peningkatan kapasitas diri; pelatihan keterampilan dasar bagi masyarakat lorong; membentuk badan usaha lorong; program industri lorong perempuan; dan kemitraan pengusaha dan UKM. Adapun beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan tanggung jawab kolektif masyarakat lorong di Kota Makassar adalah: mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan; mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan; mengikuti kegiatan keagamaan; dan mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi. Sedangkan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak secara berkelanjutan masyarakat lorong di Kota Makassar adalah: mengemukakan saran/pendapat; keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan; memberikan saran terhadap jalannya pembangunan; dan memberikan penilaian dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi.

Kata Kunci: Kemandirian Lokal, Pemberdayaan Masyarakat Lorong, Kota Makassar

Abstract

One of the forms of local self-reliance created by the community empowerment efforts undertaken by the Government of Makassar City is the empowerment of the alley community. Moving from that thought, the purpose of this study is to describe how the existence of local self-reliance through the characteristics of: have the capacity of self; Have collective responsibility; And have the ability to think. The research design uses qualitative descriptive approach. Based on the results of research conducted, then some activities that can improve the self-capacity of the aisle community in the city of Makassar are: self-capacity improvement motivation; basic skills training for the alley community; forming a corporation entity; women's aisle industry program; and partnerships between entrepreneurs and UKM. As for some activities that can increase collective responsibility of the aisle community in Makassar City are: following the maintenance activities of house and environment hygiene; follow environmental safety maintenance activities; follow religious activities; and following the activities of the economic business group. While some activities that can improve the ability to think and act in a sustainable way in Makassar City are: to give suggestions/opinions; community participation in the process/decision-making process; provide advice on the course of development; and provide an assessment and submit it as an evaluation material.

Keywords: Local Independence, Empowerment People Lorong, Makassar City

PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah yang lebih luas melalui kebijakan desentralisasi memberikan manfaat sangat besar bagi daerah. Konsekuensi dari desentralisasi adalah munculnya inisiatif daerah agar dapat mandiri dalam mengupayakan percepatan pembangunan melalui kreativitas yang dapat mendorong akselerasi pembangunan.

Pemerintah daerah harus mengembangkan inisiatif daerah atau lokal karena pemerintah daerah yang lebih tahu potensi dan keunggulan daerah masing-masing serta apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Pemerintah daerah harus mempersiapkan masyarakat dalam berbagai hal, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam hingga pengembangan nilai-nilai

positif yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Perumusan format kemandirian lokal melalui pemberdayaan masyarakat haruslah berbasis pada prinsip dasar, yaitu bagaimana menciptakan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada di sekitarnya. Dalam konteks politik, prinsip ini merupakan wujud pemberian pilihan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyuarkan aspirasinya. Implementasi prinsip ini jelas tidak harus baku atau standar, akan tetapi akan tergantung pada kondisi masing-masing masyarakat.

Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistik yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis, kemandirian lokal juga menegaskan bahwa membangun masyarakat seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini.

Konsepsi pemberdayaan masyarakat ala kemandirian lokal merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki (Amien 2005). Sependapat dengan hal tersebut Arianto dan Eliza (2013) mengemukakan bahwa selain memanfaatkan sumber daya, proses yang terjadi dalam konteks lokal harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi dasar pembangunan dan penguatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka wujud kemandirian lokal di masyarakat tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya.

Salah satu wujud kemandirian lokal yang tercipta dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pemberdayaan kawasan lorong di Kota Makassar. Ratusan lorong di kota Makassar telah mengalami revitalisasi dan pembenahan dengan berbagai program yang menyentuh seluruh aspek kehidupan warga lorong.

Penataan lorong yang diprogramkan Pemerintah Kota Makassar dan diberi nama Lorong Garden merupakan serangkaian bentuk pemberdayaan masyarakat demi memberdayakan warga yang diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang produktif untuk keluarganya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan (KP3) Kota Makassar, terdapat 7.538 lorong yang dihuni sekitar 535.000 orang. Untuk itu program Lorong Garden merupakan program strategis pemerintah kota dalam menata dan memberdayakan masyarakat Makassar.

Program lorong yang telah dijalankan Pemkot tersebut, diantaranya telah mengantarkan nama kota Makassar bergaung di level nasional bahkan internasional. Bahkan Program Lorong Keluarga Berencana telah diadopsi menjadi program nasional, sementara Lorong garden (longgar) juga mampu berkontribusi bagi penghijauan kota. Di level internasional, percontohan Lorong di wilayah Toddopuli mampu memukau ratusan walikota seAsean dan dunia saat hadir di Makassar dalam rangka menghadiri 2nd Asean Major Forum (AMF) pada Awal September 2015 lalu.

Contoh program Lorong Garden tersebut, merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan pembangunan, terutama faktor bantuan sumber daya yang berasal dari pusat. Perlu ada strategi khusus yang harus dilakukan daerah dalam mengatasi rendahnya kemampuan sumber daya manusia di daerah.

Oleh karena itu, salah satu strategi yang selama ini cukup efektif dalam mengatasi rendahnya tingkat pembangunan di daerah adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat yang tercermin pada kemandirian lokal masyarakat di daerah. Menurut Bell dan Morse (2008) dalam Agusta dan Fujiartanto (ed) (2014) bahwa kemandirian masyarakat dapat dilihat dengan karakteristik: (a) memiliki kapasitas diri (*personal self capacity*); (b) memiliki tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*); dan (c) memiliki kemampuan berpikir.

Studi pendahuluan yang dilakukan di Kota Makassar menggambarkan bahwa kapasitas diri masyarakat yang ada di lorong-kota Kota Makassar menunjukkan sikap yang apatis atau acuh tak acuh, mereka lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bepergian dan mengobrol bersama teman-temannya ketimbang mengerjakan hal-hal positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal tanggung jawab kolektif, masyarakat lorong Kota Makassar belum sepenuhnya mampu mewujudkan, hal ini terlihat dari masih adanya 'perang' (konflik) antar lorong yang melibatkan kelompok masyarakat yang ada di dalam lorong-lorong tersebut. Sedangkan memiliki kemampuan berpikir, masyarakat lorong yang ada di Kota Makassar belum mampu merencanakan dan melaksanakan dengan baik program-program yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah lorong. Mereka baru mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial seperti kerja bakti dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui: a) Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat lorong di

Kota Makassar; b) Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tanggung jawab kolektif masyarakat lorong di Kota Makassar; c) Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan berpikir masyarakat lorong Kota Makassar.

Beberapa penelitian yang terkait dengan kemandirian lokal dan pemberdayaan masyarakat antara lain yang dilakukan oleh Arianto dan Eliza (2013) di Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa peningkatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan terjadi karena menguatnya kekuatan atau modal yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan sendiri berbagai persoalan yang mereka alami. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Widjajanti (2011) di Kabupaten Kendal Jawa Tengah menemukan bahwa proses pemberdayaan ditandai dengan adanya kemampuan masyarakat dalam membuat analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu program pemberdayaan. Peran pelaku perlu diperbaiki dalam pengetahuan dan ketrampilannya agar dapat memberi dukungan dalam memperlancar keberhasilan pemberdayaan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

Penelitian lain yang membahas tentang kemandirian masyarakat adalah yang dilakukan oleh Niniek Lely Pratiwi, dkk (2012) di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa kemandirian masyarakat di Kabupaten Rote Ndao dari sisi pengetahuan masih sangat rendah, belum ada gerakan bersama masyarakat, kader maupun tokoh masyarakat. Padahal semestinya masyarakat dapat difasilitasi dengan sosialisasi upaya pencegahan penularan penyakit TB paru, atau pembentukan kader kesehatan aktif yg baru sehingga semakin banyak lagi orang yang mempunyai knowledge, sikap pencegahan penyakit TB paru.

Adapun penelitian yang membahas tentang lorong dilakukan oleh Novri Ardi Wiranata Nur, Andi Gau Kadir, dan Andi Murfi (2014) di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitiannya, diketahui bahwa Pemerintah Kota Makassar sedang fokus pada penataan lorong-lorong di Makassar, salah satu programnya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat lorong agar mampu menata lorong melalui Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (GEMAR MTR) maksudnya tidak kotor, Lorong Garden, Program Lorong Garden (LONGGAR) bertujuan sebagai pemanfaatan lahan lorong-lorong agar menjadi lebih produktif, bersih dan tertata indah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis melalui dimensi-

dimensi kemandirian lokal masyarakat lorong di Kota Makassar, yaitu kapasitas diri; tanggung jawab kolektif; dan kemampuan berpikir masyarakat lorong di Kota Makassar. Penelitian dilakukan selama sepuluh bulan yakni Januari-Oktober 2015.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan pandangan informan (*perspective*), dan peneliti sendiri memerankan diri sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data secara mendalam. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biklen (1982) bahwa: "*Qualitative research has the natural setting as the source of data and researcher is key instrument.*" Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para aparatur sipil negara yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat lorong dan tentu saja masyarakat lorong yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lorong.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Secara operasional analisis data kualitatif adalah proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori) agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan. Pada prinsipnya analisis ini dilakukan setiap saat selama penelitian berlangsung. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini tidak terpisah satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan dan prosesnya berbentuk siklus (Creswell 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Diri Masyarakat Lorong di Kota Makassar

Salah satu permasalahan yang terdapat pada setiap negara berkembang adalah kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan model penanggulangan kemiskinan yang melibatkan langsung masyarakat dalam prosesnya. Tujuan utama dengan dilakukannya pemberdayaan yaitu untuk memberdayakan masyarakat agar dapat lebih mandiri dan dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuannya dalam memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui tindakan mereka sendiri dan untuk diri mereka sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Soetomo (2011) bahwa pengembangan kapasitas masyarakat merupakan salah satu unsur utama proses pemberdayaan disamping pemberian kewenangan, di mana muaranya adalah pada kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat

lorong dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakatnya, yakni:

Motivasi Peningkatan Kapasitas Diri

Salah satu kegiatan Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar adalah melaksanakan acara sosialisasi yang digelar oleh Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar. Dalam kegiatan tersebut peserta dibekali dengan berbagai materi yang sifatnya memotivasi dan membangun kapasitas diri, agar lebih berdaya menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Terkait dengan program Walikota Makassar, yang salah satunya adalah tata total lorong kota, pemerintah tidak hanya memikirkan bagaimana infrastruktur lorong dapat ditata sedemikian rupa, akan tetapi warga-warga penghuni lorong memerlukan sentuhan program yang bersifat pemberdayaan.

Selain itu, sosialisasi pemberdayaan ekonomi tersebut diharapkan mampu memberi motivasi untuk mengembangkan diri dan mengenali kapasitas untuk memberdayakan diri dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pelatihan Keterampilan Dasar Bagi Masyarakat Lorong

Tujuan pelatihan keterampilan dasar adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada di wilayah Lorong. Pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga di Lorong merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas ketahanan ekonomi keluarga di Lorong-lorong Kota Makassar. Selain itu, pelatihan keterampilan dasar bagi keluarga ini juga bertujuan untuk dapat meningkatkan tumbuhnya kelompok-kelompok usaha baru di Lorong-lorong Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, para peserta dalam program pelatihan keterampilan dasar akan diberi bekal pelatihan dan juga akan mendapatkan pendampingan sehingga para peserta pelatihan keterampilan dasar akan tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang kemudian akan mendapatkan pendampingan serta bantuan peralatan kerja dan fasilitasi pemasaran agar bisa berproduksi dan memasarkan produknya secara mandiri.

Di Kota Makassar, pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan perubahan perilaku secara kolektif masyarakat di lorong-lorong. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lorong, menciptakan masyarakat yang berdaya, yang memiliki kualitas yang unggul dan berperan sebagai aktor utama pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat

Lorong, pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan dengan pendekatan kekeluargaan, semua berawal dari langkah kecil, yang seringkali terasa berat untuk dimulai. Namun berbanding terbalik dengan besarnya kemanfaatan yang didapat jika langkah tersebut dilaksanakan. Seperti halnya Program Lorong Garden (Longgar) di Makassar, kegiatan ini dapat dijadikan contoh bahwa sebuah langkah yang dilakukan butuh kesungguhan dari seluruh *stakeholders* dan yang lebih penting adalah menjaga, memelihara dan mengembangkan yang sudah ada.

Membentuk Badan Usaha Lorong (BULO)

BULO (Badan Usaha Lorong) merupakan terobosan yang dilakukan oleh Walikota Makassar untuk mengembangkan lorong-lorong di Makassar agar bisa menjadi lebih produktif. Program BULO diperuntukkan bagi lorong yang telah menjalankan program Lorong Garden (Longgar). Cabai atau tanaman Lombok menjadi produk andalan BULO. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, Cabai juga bernilai ekonomis yang bisa menopang ekonomi masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, setiap SKPD pendamping dan kecamatan dapat memberikan pendampingan bagi lorong binaannya yang dimulai dari penyemaian bibit, penanaman hingga panen. Dibutuhkan waktu selama tiga bulan dari proses penyemaian hingga panen. Hasil dari BULO akan dimanfaatkan untuk tabungan pendidikan anak lorong, dan pengembangan BULO.

Program pemberdayaan lorong diharapkan agar seluruh potensi lorong diangkat dan siap membangun lorong-lorong produktif. Program pengembangan lorong ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar yang terkonsentrasi pada pemukiman padat dan gang sempit. Potensi setiap lorong akan menjadi motor penggerak menggagas lahirnya Badan Usaha Lorong (BULO).

Apapun yang diproduksi warga lorong akan ditampung oleh badan usaha ini sehingga langkah pemberdayaan lebih optimal. Saat ini, salah satu usaha lorong yaitu membangun lorong hijau yang produktif, sehingga masyarakat mandiri dalam pemenuhan sayuran sehari-hari. Nantinya diharapkan bisa menjadi lahan bisnis jika telah memiliki keterampilan yang baik dalam bidang pertanian modern secara vertikal dan hidroponik di lorong masing-masing.

Program Industri Lorong Bagi Perempuan

Program-program yang saat ini dikerjakan oleh Pemerintah Kota Makassar kaitannya dengan kemandirian lokal adalah pemberdayaan perempuan yang sudah terintegrasi dengan program program industri lorong. Jika dulunya kaum perempuan diberikan pelatihan seperti kursus menjahit dan sebagainya, kini lebih diperluas lagi dengan program

usaha kecil menengah yang diharapkan bisa merata di setiap lorong di Kota Makassar.

Program industri lorong merupakan penguatan pemberdayaan perempuan. Di mana perempuan maupun ibu rumah tangga diberikan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di lorong. Salah satu program industri berbasis lorong tersebut yakni pembuatan Batik Lontara. Selain itu, industri lorong yang fokus pada pemberdayaan perempuan tersebut sekaligus mendukung program Makassar sebagai kota layak anak dan nyaman untuk semua.

Kemitraan Pengusaha dan UKM

Pemerintah Kota Makassar juga memfasilitasi Temu Usaha Kemitraan yang diikuti seratusan pelaku usaha kecil dan menengah, tujuannya untuk meningkatkan kerja sama antarpelaku usaha dan pemerintah. Pertemuan dengan para pengusaha itu membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bertukar ide dengan akademisi, pemerintah, dan perbankan bagaimana meningkatkan usahanya. Kehadiran pengusaha kecil dan menengah selain menopang ekonomi keluarga (rumah tangga) juga memacu pertumbuhan ekonomi di Makassar. Perlu sinergi antarpemangku kepentingan agar saling memahami. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku UKM dan daya saing produk yang dihasilkan. Pelaku UKM juga bisa memanfaatkan forum ini untuk mendapatkan akses seluas-luasnya dan kemudahan dari lembaga perkreditan semisal perbankan untuk mendapatkan modal usaha dengan menaati regulasi yang ada.

Tanggung Jawab Kolektif Masyarakat Lorong di Kota Makassar

Sebagai anggota masyarakat apalagi makhluk sosial, seorang individu tidak mungkin tidak bekerja bersama dengan masyarakat. Karena masyarakat merupakan tempat segala kebutuhan individu berada. Seorang individu tidak akan bisa melepaskan diri dari masyarakat. Sebab seorang individu merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu setiap orang harus memiliki sikap ingin bekerjasama dengan masyarakat. Apabila setiap orang memiliki sikap bekerjasama yang baik dengan masyarakat, maka masyarakat akan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan bagi setiap anggota masyarakat. Namun apabila setiap individu tidak mau bekerjasama dengan masyarakat, maka masyarakat dimana tempat individu berada tidak akan mendukung individu bahkan akan terasa membatasi atau mengancam individu. Misalnya lingkungan masyarakat itu menjadi tidak aman, kotor sumber penyakit, dan lain

sebagainya.

Tanggung jawab bersama dalam masyarakat, menurut sudut pandang sosiologi termasuk ke dalam salah satu bentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dalam kehidupan masyarakat, tanpa interaksi sosial tak mungkin ada kehidupan bersama dalam masyarakat. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama, saling bicara dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Interaksi sosial merupakan dasar atau bentuk utama dari proses sosial. Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara seorang dengan orang lain, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang dengan kelompok manusia. Dalam suatu interaksi sosial harus memiliki dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi (Narwoko dan Suyanto 2010). Dalam interaksi sosial hubungan yang terjadi itu harus secara timbal balik atau harus ada reaksi dari kedua belah pihak yang mengadakan hubungan itu, sehingga terjadi interaksi sosial.

Kerjasama dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk dan pola-pola kerjasama dapat dijumpai pada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. "Pola kerjasama yang ada di masyarakat bisa berupa kegiatan gotong royong memperbaiki jalan maupun persiapan peringatan hari-hari besar. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan antara sesama warga. Hal ini mengingat banyak kegiatan pembangunan, tenaga kerja dalam pembangunan infrastruktur misalnya, bukan lagi tenaga kerja suka rela lagi, tetapi tenaga kerja yang diberi gaji, meskipun mereka bekerja di wilayah atau miliknya sendiri (Muslim 2017). Sebaliknya bentuk kerjasama sukarela tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari mempunyai manfaat bagi semua warga.

Pada masyarakat Kota Makassar, bentuk tanggung jawab yang selama ini sering dilakukan adalah gotong-royong. Aktivitas gotong royong ini tampak pada aktivitas kehidupan masyarakat, seperti: Aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, seperti menggali sumur, mengganti dinding bilik rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya; Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang

beberapa tetangga yang paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada lingkaran hidup individu; Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu seorang tetangga mengalami kematian atau bencana.

Gotong-royong kerja bakti berbeda antara gotong-royong kerja bakti untuk proyek-proyek yang timbul dari inisiatif atau swadaya warga sendiri dan gotong-royong kerja bakti untuk proyek-proyek yang 'dipaksakan' dari atas. Gotong-royong kerja bakti yang pertama, sebagai kerja bakti yang berasal dari masyarakat, misalnya hasil keputusan Musrenbang yang benar-benar sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan gotong-royong kerja bakti yang kedua seringkali tidak dipahami manfaatnya oleh warga dan dirasakan lebih sebagai sebuah kewajiban daripada sebagai sebuah kesadaran.

Beberapa bentuk dari tanggung jawab bersama yang telah dibangun masyarakat lorong di Kota Makassar, yaitu:

Mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan.

Pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam tatanan kehidupan suatu sistem sosial (masyarakat). Bagaimanapun juga penanganan masalah pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan yang tidak tepat akan berakibat buruk, terutama bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Salah satu ukuran yang dipakai untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah dengan mengetahui sejauhmana keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan. Di lorong-lorong umumnya masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.

Selain itu kesadaran akan pentingnya melakukan penyemprotan dengan anti bakteri seperti disinfektan masih jarang dilaksanakan karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat masih kurang memahami bahaya yang ditimbulkan apabila tidak melakukan penyemprotan terhadap unggas atau ternak mereka. Mereka tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan apabila bakteri-bakteri dari ternak mereka berkembang dan mengenai mereka, berbagai ancaman penyakit jelas mengincar mereka dan anggota keluarganya.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan kebersihan pada masing-masing rumah dan lingkungan akan mewujudkan suatu lingkungan yang

bersih, nyaman dan indah, untuk mencapai hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta manfaatnya.

Mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang sifatnya sukarela, lahir atas prakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Partisipasi yang demikian merupakan modal utama dan potensi yang sangat esensial bagi pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pencapaian tujuan, bermanfaat serta mendukung masyarakat.

Peranan masyarakat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif sangat diperlukan karena hal ini dapat memberi ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat sehingga pembangunan akan berjalan baik dan lancar. Dengan demikian salah satu ukuran peran masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan yaitu dengan mengukur sejauhmana masyarakat terlibat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan masing-masing.

Umumnya masyarakat cukup sering terlibat dalam kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan dikarenakan mereka berpendapat bahwa kegiatan tersebut bukan semata tugas dari aparat kepolisian atau hansip saja, akan tetapi merupakan salah satu kewajiban mereka. Selain itu, jika dilihat dari faktor ekonomis, swadaya masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan masing-masing akan lebih menghemat biaya, karena apabila kewajiban menjaga keamanan diserahkan kepada seorang satpam atau petugas keamanan maka warga masyarakat harus mengeluarkan biaya keamanan sebagai upah yang diberikan kepada satpam. Kegiatan ini sendiri biasanya dikordinir oleh RT atau RW setempat maupun tokoh masyarakat.

Organisasi lokal yang dipimpin oleh kalangan masyarakat sendiri seperti RT dan RW dilingkungan masing-masing yang keberadaannya sangat penting karena dapat memobilisasi pemberdayaan masyarakat, mereka dapat membentuk satuan-satuan ronda yang berjaga secara bergiliran, sehingga kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan dapat berjalan lebih efektif. Jika kegiatan ini dikembangkan maka lingkungan masyarakat menjadi kondusif dan masyarakat akan mendapatkan perasaan yang aman dan terancam.

Partisipasi semacam ini dibutuhkan suatu keterlibatan masyarakat yang dimobilisasi oleh pihak lain, sebagaimana yang dikatakan Thoha (1990) bahwa:

“...partisipasi adakalanya dilakukan secara mandiri dan adakalanya dengan mobilisasi. Partisipasi mandiri adalah suatu usaha berperan serta yang dilakukan sendiri oleh pelakunya untuk mempengaruhi *policy* yang bakal dibuat. Partisipasi mobilisasi adalah keikutsertaan rakyat dalam berperan serta untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara dimobilisasi oleh pihak lain”.

Mobilisasi masyarakat pada kegiatan pemeliharaan keamanan di lingkungan masing-masing oleh RT maupun RW setempat bertujuan untuk mengkoordinir kegiatan tersebut agar tercipta rasa keadilan, kebersamaan dan tanggungjawab pada masyarakat.

Mengikuti kegiatan keagamaan

Pembangunan masyarakat disegala bidang membutuhkan inisiatif dari masyarakat sendiri, tetapi apabila inisiatif ini tidak tumbuh maka dibutuhkan adanya pihak lain untuk menyadarkannya. Beberapa kalangan seperti para muballigh, para kyai, para guru agama, para da'i dan lain-lain merupakan contoh para tokoh yang masih disegani dan memiliki peran penting dimasyarakat. Surjadi (2005) mengatakan “para muballigh, para kyai, para guru agama, para da'i adalah merupakan petugas-petugas pembangunan masyarakat secara sukarela baik atas nama pribadinya maupun atas nama organisasinya”.

Dengan demikian, salah satu ukuran yang dipakai untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah dengan mengetahui sejauhmana keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, Pengajian, ceramah agama dan kegiatan keagamaan lainnya.

Seringnya masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan dilingkungan masing-masing didorong oleh ketaatan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, apalagi penganut agama Islam merupakan mayoritas di negeri ini. Para tokoh agama menjadikan media khutbah jum'at, pengajian umum, perayaan hari-hari besar keagamaan dan lain-lain, itu semuanya bisa dijadikan forum untuk mendidik, menyadarkan masyarakat, dimana para tokoh ini (sukarelawan) mempunyai tugas yang langsung menyentuh kejiwaan masyarakat, merangsang, mendorong, menyadarkan masyarakat akan kebutuhan-kebutuhan ataupun problema-problema kehidupan bersama ataupun individu.

Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi

Usaha pembangunan pada umumnya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa sekarang dan masa yang akan datang, kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya sangat beragam, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang menKelurahank yang

dirasakan oleh masyarakat sehingga harus mendapat prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

Struktur dan kondisi permasalahan yang biasanya dihadapi masyarakat pada umumnya adalah tingkat pendapatan yang rendah. Perkembangan perekonomian masyarakat pada umumnya berjalan relatif lambat. Pada situasi ini pemerintah harus mensinergikan dengan sistem atau kebijakan dalam upaya pemberdayaan perekonomian rakyat salah satunya dengan menjalin mitra usaha dengan masyarakat.

Peranserta masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan salah satunya tercermin dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi. Di lapangan, masyarakat masih jarang yang mengetahui kegiatan kelompok usaha ekonomi tersebut. Hanya sedikit yang mengetahui adanya kegiatan tersebut. Akibat dari kurangnya informasi yang disampaikan oleh aparat kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak mengetahui manfaat dari kegiatan kelompok usaha ekonomi tersebut. karena kurangnya informasi serta komunikasi yang tidak lancar antara masyarakat dan pemerintah.

Sebagaimana yang diungkapkan Priyatna (1996) bahwa : “Partisipasi yang keputusannya terletak pada rakyat sendiri, tak akan berjalan tanpa suatu keyakinan bahwa apa yang mereka akan lakukan, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya atau untuk masyarakat dan negara. Hal ini hanya mungkin dapat dicapai melalui suatu pendekatan, komunikasi dan proses persuasi yang intensif”.

Ketidaktahuan masyarakat atas program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta tidak lancarnya arus informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan suatu program pembangunan. Melalui suatu pendekatan, komunikasi dan proses persuasi yang intensif mengenai program-program pemberdayaan ekonomi rakyat ini, harus segera menjadi perhatian pemerintah, karena akan mendatangkan banyak keuntungan, terutama bagi golongan ekonomi lemah.

Makna dari pembangunan masyarakat adalah pengembangan masyarakat, sejalan dengan makna tersebut bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan, maka dalam pelaksanaannya pembangunan haruslah menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan prosesnya harus menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini, kelompok-kelompok tertentu seperti petani dan nelayan miskin perlu mendapat perhatian dari pemerintah, kemampuan mereka perlu dikembangkan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang jadi mata pencaharian mereka.

Di komunitas nelayan ditemukan banyak masyarakat jarang bahkan tidak pernah ikut serta

dalam kegiatan kelompok usaha nelayan. Kenyataan ini dikarenakan kurangnya informasi yang disampaikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat tentang kegiatan kelompok usaha nelayan tersebut. Sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat dari kegiatan tersebut bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya kegiatan tersebut.

Gambaran tersebut menunjukkan kecenderungan menurunnya hubungan kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat, peranan pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pembangunan kepada masyarakat mutlak sangat diperlukan, agar masyarakat mau turut serta dalam kegiatan program pembangunan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Iskandar (2004) bahwa “pelaksanaan pembangunan membutuhkan sistem informasi yang tersedia dengan mutu yang baik, pada saat yang tepat dan dapat diperoleh dengan mudah. Informasi harus tersedia disegala tingkatan dari tingkat pusat hingga tingkat Kelurahan”.

Kemampuan Berpikir Masyarakat LorongKota Makassar.

Kemampuan berpikir dan bertindak masyarakat dalam konsep kemandirian lokal dapat dikategorikan sebagai kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Widjajanti (2011) bahwa kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan/proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat/saran dalam menilai suatu program/kebijakan yang akan ditetapkan. Dalam praktek pemerintahan hal ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Musbangkel, Rakorbang dan lain sebagainya.

Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif di lorong-lorong wilayahnya masing-masing, tercermin dari:

Mengemukakan pendapat/saran dalam setiap pertemuan/rapat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan *issue* sentral, sehingga harus diberikan tempat yang proporsional, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Oleh karenanya sudah dimaklumi bahwa memandang masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subjek pembangunan, yang mampu

menetapkan tujuan serta keinginan mereka.

Masyarakat memiliki potensi yang sangat besar, baik yang dilihat dari sumber daya yang ada maupun dari sumber sosial budaya, hal tersebut bila dipadukan akan menjadi kekuatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sendiri. Dengan memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta kemudian diungkapkan pada sebuah rapat pertemuan maka akan mencetuskan suatu ide atau gagasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pada proses perencanaan pembangunan

Kondisi di lapangan juga membuktikan bahwa masyarakat cenderung cukup aktif dalam mengemukakan saran/pendapat bukan sekedar menjadi pendengar saja, walaupun para elit lebih mendominasi masukan untuk perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang hadir memang betul-betul ingin menyampaikan saran dan pendapatnya kepada pemerintah.

Walaupun pada kenyataannya hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan yang sering diungkapkan oleh para penyelenggara pemerintahan yang menyatakan “kami siap menampung aspirasi masyarakat”, bahkan akhirnya perencanaan program pembangunan merupakan inisiatif dari beberapa pihak saja atau yang disebut elit pemerintah tadi. Dengan demikian apabila suatu program pembangunan yang didalam perencanaannya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran atau pendapatnya maka hasilnya akan memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan pembuatan keputusan, merupakan suatu keterlibatan masyarakat secara langsung pada proses perencanaan pembangunan. Kondisi yang selama ini banyak kita temukan di lapangan bahwa suatu keputusan ditentukan oleh aparat pemerintah, serta musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah seringkali hanya sebagai agenda belaka tanpa menghasilkan sesuatu yang nyata.

Masyarakat tidak diberdayakan dalam proses perumusan pembuatan keputusan, sehingga masyarakat seringkali menganggap rapat hanyalah formalitas belaka. Hal ini diperparah oleh sikap masyarakat sendiri yang apatis dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Memberikan saran terhadap jalannya pembangunan.

Masih rendahnya standar penyelenggaraan pembangunan diakibatkan kurang mantapnya

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugas pembangunan, aparat pemerintah belum memperlihatkan kinerja yang optimal. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan saran terhadap jalannya pembangunan masih perlu ditingkatkan. Hal ini didukung oleh data, rendahnya angka persentase tanggapan responden yang menyatakan masyarakat sering dan sangat sering memberikan saran terhadap jalannya pembangunan.

Hal ini sebagaimana beberapa pernyataan dilapangan bahwa masyarakat jarang memberikan saran yang sifatnya membangun terhadap jalannya pembangunan dikarenakan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan kewajiban memberikan dukungan terhadap jalannya pembangunan, akibatnya mereka jadi merasa tidak memiliki proyek-proyek pembangunan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Khairudin (1993) yang menyatakan bahwa “ banyak kegagalan dalam pembangunan fisik hanya karena masyarakat tidak merasa memiliki proyek pembangunan itu, dan akibatnya masyarakat tidak merasa berkewajiban untuk memelihara hasil proyek pembangunan tersebut, meskipun hasil pembangunan tersebut sesungguhnya sangat mereka butuhkan”.

Menurut Sudriamunawar (2006) bahwa “peran serta masyarakat yang tinggi akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pembangunan (pemerintah), tetapi peran serta masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan”.

Memberikan penilaian dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi.

Kedudukan masyarakat yang merupakan objek sekaligus subjek pembangunan, seharusnya dibarengi dengan keleluasaan dalam memberikan penilaian terhadap jalannya pembangunan dan penilaian tersebut dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki jalannya pembangunan dimasa yang akan datang agar memperoleh hasil yang lebih optimal. Adapun tujuan dari evaluasi menurut Suharto (2005) adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan; Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran; Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (*externalities*).

Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan penilaian dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi ini, karena tidak tersedianya

akses atau media untuk masyarakat dalam menyampaikan penilaian dan bahan evaluasi terhadap jalannya pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Ketidakterdayaan masyarakat untuk ikut dalam pembangunan diakibatkan oleh tertutupnya kesempatan dan saluran untuk mengaktualisasikan aspirasi yang mengakibatkan masyarakat tidak terbiasa dan tidak terlatih untuk mengajukan pandangan dan penilaian atas sesuatu hal. Disamping itu, sentralisasi kekuasaan telah menciptakan atmosfer kekuasaan yang sangat menakutkan bagi rakyat yang berakibat pada munculnya pemerintah sebagai aktor yang dominan yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh bahkan kekuasaan absolut pemerintah dimaksud telah menjadikan rakyat terkena sindrom legalitas yang akibatnya semua masalah selalu dipulangkan kepada legalitas dan bukan legitimasi. Jadi yang penting disetujui pemerintah (*legalitas*) daripada adanya dukungan dari rakyat (*legitimasi*).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kegiatan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting, hal ini untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dan efisiensi program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Simandjuntak dan Pasaribu (1986) bahwa “Evaluasi hasil pembangunan amat perlu untuk menghilangkan yang tidak perlu, menambah yang masih kurang dan tidak ada, kemudian memelihara yang sudah tepat, guna menyempurnakan tindakan lebih lanjut”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Mewujudkan kemandirian lokal melalui upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, dapat dilihat melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kapasitas diri dari masyarakat lorong; 2) Meningkatkan tanggung jawab kolektif masyarakat lorong; 2) Meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak secara berkelanjutan masyarakat lorong. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas diri dari masyarakat lorong di Kota Makassar adalah: sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat; pelatihan keterampilan dasar bagi masyarakat lorong; membentuk badan usaha lorong; program industri lorong perempuan; dan kemitraan pengusaha dan UKM. Adapun beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan tanggung jawab kolektif masyarakat lorong di Kota Makassar adalah: mengikuti kegiatan

pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan; mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan; mengikuti kegiatan keagamaan; dan mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi. Sedangkan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak secara berkelanjutan masyarakat lorong di Kota Makassar adalah: mengemukakan saran/pendapat; keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan; memberikan saran terhadap jalannya pembangunan; dan memberikan penilaian dan menyampaikannya sebagai bahan evaluasi.

Rekomendasi

Pemerintah Kota Makassar perlu membuat kebijakan yang fokusnya terhadap pemberdayaan warga lorong di Kota Makassar. Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan dilakukan didasarkan atas kebutuhan yang obyektif bagi warga masyarakat lorong.

Peningkatan kapasitas diri masyarakat lorong di Kota Makassar melalui program pelatihan dan keterampilan perlu terus menerus dilakukan agar warga masyarakat lorong mampu meningkatkan kreativitas dirinya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah Kota Makassar perlu mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kohesivitas warga masyarakat lorong, agar warga makin kompak dan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya masing-masing.

Pemerintah Kota Makassar perlu membuka ruang diskusi bagi warga masyarakat lorong agar tumbuh kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir dan bertindak yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat lorong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan banyak pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini, dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Mohammad Syarif, sebagai Camat Ujung Pandang dan beberapa tokoh masyarakat lorong yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu menjadi titik kontak beberapa informan. Terima kasih juga kepada informan lain yang telah meluangkan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Kurniawan dan Eliza Nur Fitriana. 2013. "Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan." Yogyakarta: Jurnal

- Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 17(No. 2): 15-27. Sumber <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6853>, 2013.
- Iskandar, Jusman. 2004. "Teori dan Isu Pembangunan." Bandung: Puspaga.
- Khairuddin, H. 1993. "Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan." Yogyakarta: Liberty.
- Muslim, Azis. 2017. "Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin". Bogor: Jurnal Penyuluhan. Vol. 13 (No.1): 79-87, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/14524/11629>.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2010. "Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan." Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nur, Novri Ardi Wiranata, Andi Gau Kadir, dan Andi Murfi. 2014. "Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar." Makassar: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 7, No.1, hal. 61-72. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/File/1257/pdf>.
- Pratiwi, Niniek Lely, dkk. 2012. Kemandirian Masyarakat Dalam Perilaku Pencegahan Penularan Penyakit TB Paru." Surabaya: Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Vol. 15(No. 2): 162-169. Sumber <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2990>.
- Priyatna, Suganda. 1996. "Motivasi, Patisipasi dan Pembangunan." Jakarta: Universitas Kartanegara Press.
- Simandjuntak, B dan Pasaribu, I.L. 1986. "Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa." Bandung: Tarsito.
- Soetomo. 2011. "Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. "Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas." Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suharto, Edi. 2005. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat." Bandung: Refika Aditama.
- Surjadi, A. 2005. "Da'wah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa." Bandung: Mandar Maju.
- Thoha, Miftah. 1990. "Kepemimpinan dalam Pembangunan, Pendekatan Perilaku." Jakarta: Rajawali Press.
- Widjajanti, Kesi. 2011. "Pemberdayaan Masyarakat." Surakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12, (No. 1): 16-27. Sumber <http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/202/189>.